

Good Governance Badan Amil Zakat, Infak , dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzaki

Jumaizi, STIMART, AMNI

Zainal A Wijaya Fakultas Ekonomi UNISSULA

Abstract

This paper is to describe about Good Governance of BAZIS and it's impact to BAZIS muzaki's satisfaction and loylity. This paper is based on the research using descriptive analysis approach. The population of this research was BAZIS muzaki in Central Java, and the sample were taken by 150 muzaki in Central Java. The technique used to get data was questionet and in-dept interview. Partial Least Square (PLS) was analysis tool used.

The result of this research shows that transparency, accountability, and advantage are important variables for good governance of BAZIS. Transparency, accountability, and advantage of BAZIS significantly influence to BAZIS muzaki's satisfication and loyalty. Besides the two of independent variables, the research also found one independent variable which has never been available in good governance theory before. It is the use of BAZIS. This finding was resulted from the interview of BAZIS muzaki and can be a reference for the next research.

Key words : *good governance, transparency, accountability, advantage, satisfaction, and loyalty.*

Pendahuluan

Milenium Development Goals (MDGs) merupakan sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000 oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara dengan menandatangani deklarasi yang disebut sebagai *millennium declaration*. Deklarasi itu mengandung delapan poin yang harus dicapai sebelum 2015, yaitu meliputi penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap HIV/AIDS,

malaria dan penyakit lainnya, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan reproduksi, pelestarian lingkungan hidup dan kerja sama global untuk pembangunan. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan global tersebut, Indonesia harus secara serius melakukan berbagai upaya agar delapan sasaran tersebut dapat dicapai.

Poin terpenting dalam delapan poin tersebut adalah masalah pengentasan kemiskinan. Zakat, infak dan shodaqoh merupakan instrumen ekonomi Islam yang

menarik untuk dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubah: 60), dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. jumbuh fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro poor*. Tak ada satupun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syaria. Ketiga, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Keempat, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang

Secara teologi, diperlukan kehati-hatian dalam internalisasi tujuan Filantropi yaitu memanfaatkan dana-dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, dan keadilan sosial. Kehati-hatian tersebut pertama, secara filosofi filantropi bersumber pada ideologi humanities yang mengagungkan, dan menjunjung tinggi kedudukan manusia. Kedua, filantropi menyangkut kegunaan, faedah dan manfaat terluas dari tujuan kedermawanan, karena itu ia sangat memperhatikan akibat dan bukan hakikat perbuatan kedermawanan. Jebakan psikologis manfaat tanpa mempertimbangkan asal dana dan siapa yang berderma, atas nama kesejahteraan masyarakat, seseorang dapat saja melanggar hak asasi manusia seperti hak milik. Karena itu diperlukan adanya transparansi, pertanggungjawaban dan juga kemanfaatan atas dana dan alokasi dana serta niat seseorang yang jelas baiknya. Kejelasan niat seseorang merupakan persoalan dasar dalam ajaran agama, khususnya agama Islam. Hal itu menyangkut kebenaran tindakan (amal) seseorang sehingga diridhoi oleh Allah SWT. Sebuah hadist menjelaskan "sesungguhnya sahnya amal tergantung niat" (Welhendri.2006).

Keinginan seseorang atau masyarakat berderma, bermurah hati untuk berbagi pada seseorang, kelompok dan organisasi sangat dipengaruhi oleh citra atau pandangan yang melekat pada lembaga tersebut. Orang tidak akan mau berderma apabila ia melihat bahwa

dana yang diberikannya tidak sampai pada apa yang telah diniatkan. Selain itu, bantuan yang diberikan harus dikelola searif mungkin, dan dapat diberdaya gunakan terhadap sasaran yang diinginkan si penderma (Irdam. 2006).

Selanjutnya irdam (2006) menjelaskan beberapa strategi untuk menggalang dana filantropi masyarakat. Pertama, membangun *community awareness* melalui berbagai media komunikasi dengan memberikan beberapa contoh *best practice* filantropi masyarakat yang telah mengubah kehidupan seseorang ataupun kelompok masyarakat dari kondisi memprihatinkan ke arah hidup yang lebih baik. Cara ini dipandang cukup efektif dalam menggugah dan menyadarkan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berderma. Kedua, membangun citra lembaga melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, dan juga bermanfaat serta dana filantropi berdaya guna bagi penerima manfaat (*beneficiaries*). Masyarakat yang sudah berderma akan merasa puas dan berkesan bahwa niat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan sudah tercapai.

Welhendri (2006) menjelaskan bahwa agama mengajarkan untuk berlaku namar, sekalipun pahit. Berlaku benar untuk mendapatkan kepercayaan publik sedikit lebih berat, karena beberapa sebab berikut :

1. Masih "gelap" di mata publik khususnya dalam pengelolaan dana- dana sosial, dan

bahwa pengorganisasian masyarakat tidak sama dengan pengorganisaian dana.

2. Kebanyakan organisasi ini belum professional sehingga rawan penyelewengan dana publik shingga selain komitmen dalam pengelolaan dana sosial secara bertanggung jawab dibutuhkan adanya transparansi sebagai cerminan sikap taqwa karena memiliki motivasi kebajikan, kesucian hati, dan kemuliaan tujuan (Welhendri, 2006).

Dalam konteks transparansi itu merupakan dorongan terjadinya transformasi sikap seseorang dalam aktifitas berinteraksi dengan sesama manusia khususnya dalam berderma. Transformasi berarti sebuah perubahan dalam motif tindakan seseorang dan anggota masyarakat. Perubahan yang terarah seraya menawarkan jalan dan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial (Welhendri. 2006).

BAZIS Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang distribusi pendapatan dari si kaya kepada si miskin, memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZIS Jawa Tengah disalurkan kepada fakir miskin (80.24%), sabilillah (18.76%), dan muallaf, ghorimin, serta ibnu sabil (1%). Sedangkan dana yang terkumpul dari infak dan sedekah untuk kemaslahatan umat atau peningkatan Sumber Daya Manusia (37.39%), sosial keagamaan (35%), dan untuk

pengembangan lembaga serta sosialisai (27.61%). (BAZIS. 2006).

Strategi pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepada fakir miskin, pembinaan kegiatan keagamaan kepada sabilillah, dan kepada muallaf, ghorimin, dan ibnu sabil diberikan pembinaan akidah, pelunasan hutang, dan bantuan kehabisan bekal. Untuk program unggulan meliputi pembinaan SDM melalui beasiswa, guru ngaji, dan usaha produktif melalui qadrul hasan, dan mudharabah. Sedang peran BAZIS dalam menggurangi kemiskinan, BAZIS melakukan pengembangan potensi masyarakat (*enabling*), memperkuat potensi masyarakat, dan pemberdayaan (*empowering*), dan melindungi masyarakat (*recovering*). (BAZIS.2006).

2. Tinjauan Pustaka

Teori keagenan (*agency theory*) : Dalam teori ini dijelaskan bahwa secara ideal, agen dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memaksimalkan kemakmuran. Namun kenyataannya, karena adanya informasi asimetri dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pemilik, maka agen akan menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan pemilik (Jensen,1986).

Dalam perjalanan waktu, masalah keagenan semakin kompleks, dimana masalah

keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dengan pemilik, tetapi juga antara pemegang saham dengan kreditur. Antara pemegang saham dengan *stakeholders* seperti : pemasok, karyawan dan *stakeholders* yang lain (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang, *et.al* 2000; Ariyoto, 2000). Adanya konflik keagenan yang semakin kompleks ini kemudian diperlukan *good corporate governace*, agar kepentingan berbagai pihak yang terlibat dengan lembaga tidak dirugikan.

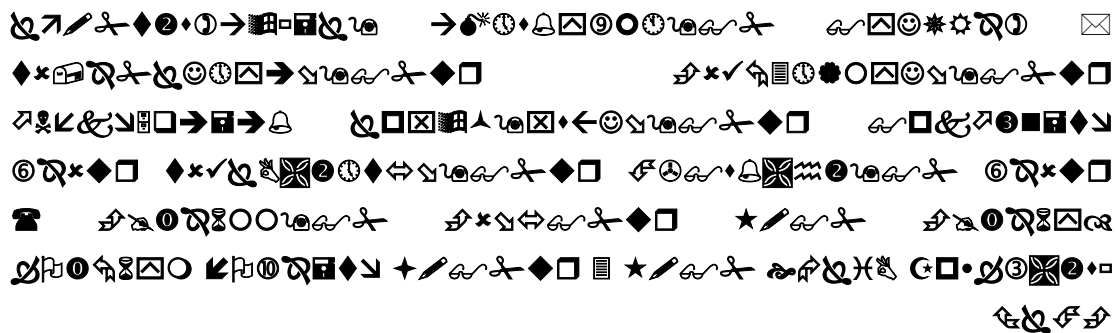
Menurut Solomon and Solomon (2004) terdapat dua sudut pandang *corporate governance*, yaitu *corporate governance* dalam sudut pandang sempit dan luas. *Corporate governance* berdasarkan sudut pandang sempit adalah sebagai hubungan antara perusahaan (pengelola) dengan pemegang saham (pemilik) . *Corporate governance* menurut sudut pandang luas adalah hubungan antara perusahaan (satu unit ekonomi) dengan pemegang saham, juga antara pengelola dengan *stakeholders* lain, seperti : Karyawan, pelanggan, pemasok dan sebagainya. Berdasarkan uraian ini, Solomon and Solomon (2004) mendefinisi *corporate governance* sebagai suatu *check and balance*, baik internal maupun eksternal yang menjamin, bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* dan tanggung jawab secara sosial terhadap semua aktifitas perusahaan.

Ada dua teori keagenan, yaitu *positivist agency theory* dan *prinsipal agennt theory* (Elisenhart,1998).

Dalam *positivist agency theory* lebih menfokuskan pada identifikasi situasi ketika agen dan principal mempunyai tujuan yang berbeda dan kemudian menjelaskan mekanisme *governance* yang dapat membatasi *self interest* dari agen. Aliran ini membahas tentang

hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer. Teori ini dikembangkan oleh Jensen and Meckling (1986), Solusi untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham adalah kepemilikan ekuitas (Jensen and Meckling, 1986).

Kepemilikan ekuitas juga digariskan dalam Q.S at-Taubah ayat 60 sebagai berikut :



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu asnaf dari 8 asnaf yang berhak atas zakat adalah amil atau pengelola zakat yaitu seperdelapan bagian.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa secara ideal agen dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Namun kenyataannya, karena adanya informasi yang asimetri dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak

dibanding pemilik, maka agen akan menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan pemilik (Jensen,1986).

Ada dua paradigma *corporate governance*, yaitu paradigma *shareholding* dan paradigma *stakeholding* (Letsa and Sun. 2002). *Corporate governance* menurut paradigma *shareholding* mempunyai ciri “*individual liberty*” yang tujuannya hanya untuk

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Namun *corporate governance* menurut paradigma *stakeholding*, mempunyai ciri “*justice for all*” yang tujuannya untuk mengakomodasikan kepentingan seluruh *stakeholders*.

Kedua paradigma tersebut memberikan analisis dan teori yang mempunyai polarisasi satu dengan yang lain dalam memahami konsep *corporate governance*, bahkan polarisasi tersebut juga muncul pada masing- masing paradigma, karena asumsi- asumsi yang mereka gunakan berbeda. Analisis untuk *stakeholding perspective* dijelaskan sebagai berikut.

a. Social entity theory

Teori ini menyatakan bahwa organisasi bukan sebuah asosiasi privat yang dimiliki individu, tetapi asosiasi publik yang disahkan melalui proses legal, dan politik untuk mencapai tujuan bersama, baik tujuan komersial maupun tujuan sosial. Teori ini juga berargumentasi bahwa perusahaan atau organisasi merupakan institusi sosial yang didasarkan pada nilai- nilai fundamental dan moral masyarakat.

b. The pluralistic model

Model ini berargumentasi bahwa organisasi atau perusahaan harus melayani dan mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan perusahaan yang lebih efisien, dan lebih terlegitimasi. *Corporate govenance* dalam model ini menyatakan bahwa hak kepemilikan berada pada seluruh *stakeholders* karena *stakeholders* ikut

mendanai perusahaan, menanggung resiko, dan memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan untuk mempertinggikan efektifitas, dan efisiensi organisasi atau perusahaan.

Good governance diucapkan oleh banyak orang Indonesia Sejak tahun 1993. Kata *governance* mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, professional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di Kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggir kota.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja organisasi, membuat organisasi menjadi akuntabel, dan membangun pelaku- pelaku ekonomi untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik, dan cara kerja organisasi. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus dapat menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan dengan cara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

Masyarakat transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator tentang prinsip tata kelola organsasi yang baik, yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, dan Manfaat.

Sejumlah pendapat lain mengenai prinsip *good governance* adalah *Asian Development Bank* menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh pilar yaitu 1. *Accountability*, 2. *Tranparency*, 3. *Usefull*, 4. *predictability* (*prediktabilitas*). Dan 5. *participation*.

Komponen atau pun prinsip yang melandasi tata kelola yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada dua prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu 1. akuntabilitas, 2. transparansi. Dan prinsip lain yang dianggap penting juga, yaitu Manfaat.

Beberapa Hasil Penelitian

Penelitian tentang persepsi pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Kodia Semarang tentang pengelolaan BAZIS berbasis produktif oleh Zainal Alim Adiwijaya dkk. (2003) menghasilkan kesimpulan bahwa pengelola dana filantropi di kodia Semarang sangat setuju bila pengelolaan LAZIS dan BAZIS lebih produktif, terprogram dan terkoordinir secara masif. Dalam penelitian tersebut direkomendasikan bahwa dibutuhkan tata kelola BAZIS yang terpercaya agar potensi zakat, infak dan shodaqoh dapat tergali dari masyarakat dan bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian Abu Baker dan Chaider (2006) pandangan kaum muslim terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat sebagai berikut : kepercayaan para donor

terhadap organisasi keagamaan yang menyalurkan dana dengan transparan, penolakan terhadap pencarian dana di jalan-jalan raya karena akuntabilitas yang rendah, keinginan untuk mengaudit organisasi filantropi dan mengumumkan hasilnya. 62 % responden enggan memberikan filantropinya melalui organisasi yang belum mereka kenal dengan baik karena alasan tanggung jawab (akuntabilitas).

Kuatnya rasa tidak percaya pada aktifitas derma jalanan (*street fundraising*) sejatinya sejalan dengan pernyataan keinginan masyarakat (63 %) untuk mengetahui apakah shodaqoh mereka benar-benar sampai ke tangan orang yang berhak menerima. Dengan kata lain mereka mendambakan organisasi filantropi yang akuntabel. Ini juga tercermin dalam keinginan mereka terhadap adanya audit tahunan atas keadaan keuangan organisasi filantropi (90%), penyampaian laporan kepada masyarakat (92 %). Sejumlah besar muzakki (88%) memandang perlunya pertanggungjawaban dana yang terkumpul secara transparan.

Terdapat 10 hak yang melekat pada penyumbang berdasar pada *a Donor Hill of Right* yang dicetuskan para *fundraiser* dan pakar filantropi internasional. Diantaranya yang utama adalah berhak mengetahui profil dan misi organisasi yang disokongnya. Selain itu mereka juga berhak mengetahui kredibilitas dan juga menerima laporan keuangan organisasi secara transparan dan memperoleh garansi bahwa

donasi mereka dikelola dengan benar (*accountable*).

Manfaat dari suatu institusi filantropi yang dirasakan oleh penerima yang berhak atas dana filantropi membuat para pendonor puas dan merasa apa yang diinginkannya telah sampai pada tujuan. Naser and Moutinho (1997) menghasilkan penelitian bahwa karya organisasi yang dapat diterima masyarakat merupakan karya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin baik pemenuhan kebutuhan masyarakat maka akan semakin baik dampak pada organisasi dan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan.

Levesque and McDougall (1998) menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam memberikan manfaat sosial pada masyarakat maka akan dapat diterima dimana organisasi itu berada dan masyarakat luas dapat memberikan dukungan positif terhadap kelancaran organisasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan memfokuskan pada identifikasi yang mendalam tentang transparansi informasi BAZIS, akuntabilitas BAZIS dan manfaat BAZIS serta dampaknya terhadap

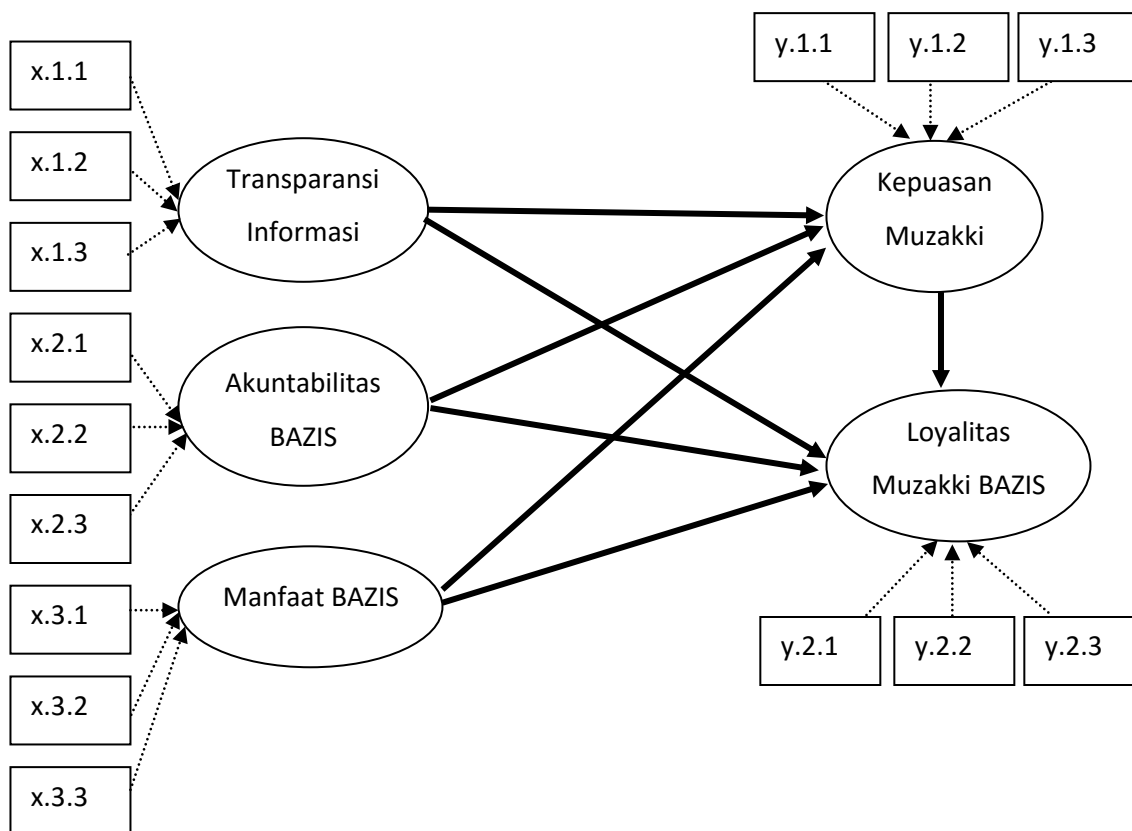
muzaki menunaikan zakat, infak dan shodaqoh pada BAZIS Propinsi Jawa Tengah.

Adapun metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara studi literatur, observasi responden, metode wawancara dengan muzaki BAZIS Propinsi Jawa Tengah. Keseluruhan metode tersebut akan dibantu dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* untuk mempermudah dalam menganalisis data.

3.1 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan telaah dan kajian atas berbagai referensi teoritik dan empirik dapat dirumuskan kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam riset empiris ini, seperti tampak dalam gambar 3.1. Gambar 3.1 menunjukkan variabel laten yang akan diteliti yaitu ada lima variabel dan masing masing variabel diambil tiga indikator. Nama-nama variabel dan indikator dijelaskan setelah gambar kerangka konseptual sebagai berikut.

Nama-nama variabel dan indikator dijelaskan setelah gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Keterangan :



Gambar 1

Kerangka Konseptual

Adapun susunan atau keterangan variabel dan indikator dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Variabel Laten dan Indikator

N0	Variabel Laten	Indikator
1.	Transparansi informasi	a. Mekanisme sistem keterbukaan dan

		<p>standar dari semua proses pelayanan BAZIS</p> <p>b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik</p> <p>c. Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi maupun penyimpangan organisasi BAZIS</p>
2.	Akuntabilitas	<p>a. Memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku</p> <p>b. Mampu bertanggung jawab setiap wewenang yang diberikan pada masing-masing bagian.</p> <p>c. Dilakukan audit oleh eksternal auditor</p>
3	Manfaat BAZIS	<p>a. Peningkatan ekonomi konsumsi</p> <p>b. Peningkatan daya beli pendidikan</p> <p>c. Peningkatan ekonomi produktif</p>
4	Kepuasan muzaki (menunaikan ZIS kepada) BAZIS	<p>a. Sesuai dengan harapan muzaki</p> <p>b. Senang atas pengelolaan BAZIS</p> <p>c. Yakin atas keputusan muzaki menunaikan ZIS pada BAZIS adalah benar</p>

3.2 Populasi dan sampel

Populasi yaitu jumlah dari keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Coper, 1995). Dalam penelitian ini populasi meliputi seluruh Muzaki BAZIS Propinsi Jawa Tengah. Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Teknik penarikan sampel dengan purposive *Sampling* dimana

masing-masing daerah di Propinsi Jawa Tengah akan dipilih muzaki yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan relevansi peneliti. Kemudian besarnya sampel (*sample size*) mengacu pendapat Hair (1992), yang mengatakan bahwa jumlah sampel adalah indikator dikali 5 sampai 10. Oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 kali

15 sampai 10 kali 15 (indikator) sebesar 75 sampai 150 responden.

4 Pembahasan

4.1. Hasil Analisis PLS

Dari data yang diperoleh dari 150 sample BAZIS dilakukan pengujian *Partial Least Square (PLS)* dapat disampaikan sabafai berikut :

Langkah Pertama : Membaca Hasil *Outer Model/ Measurement Model*

Ada tiga kriteria untuk menilai *outer model* yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Dari kelima konstruk atau laten dalam penelitian ini, yaitu : Transparansi Informasi BAZIS (X1), Akuntabilitas BAZIS (X2), Kemanfaatan BAZIS (X3), Kepuasan Muzaki (Y1), Loyalitas Muzaki (Y2) diperoleh nilai *loading factor* dari masing- masing indikator di atas 0.50 seperti yang tercantum di lampiran 1. Jadi semua konstruk atau laten dalam penelitian ini telah memenuhi *Convergent Validity* yang tinggi.

b. *Composite Reability*

Dari Tabel 3.2 dapat disampaikan bahwa masing- masing konstruk atau laten sangat reliabel karena memiliki *Composite Reability* yang tinggi di atas 0.50. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh sangat reliabel

Tabel 3.2
Composite Reability

<i>Construct</i>	<i>Composite Reability</i>
Transparansi informasi BAZIS	0.898
Akuntabilitas BAZIS	0.893
Kemanfaatan Bazis	0.863
Kepuasan muzaki	0.913
Loyalitas muzaki	0.931

Sumber : data yang diolah

c. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dapat dilihat dari *cross loading*. Nilai korelasi indikator terhadap konstruk atau latennya harus lebih besar

dibandingkan nilai korelasi antara indikator dengan konstruk lainnya. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa nilai loading untuk semua indikator baik Transparansi Informasi BAZIS

(X1), Akuntabilitas BAZIS (X2), Kemanfaatan BAZIS (X3), Kepuasan Muzaki (Y1), Loyalitas Muzaki (Y2), mempunyai nilai lebih besar

dibandingkan dengan nilai korelasi indikator konstruk lainnya. Begitu juga dengan konstruk yang lain. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

2. Langkah Kedua : Membaca Hasil (*Inner Model* atau Hubungan antara Konstruk)

Tabel 3.3
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh antar Variabel	Koefisien Estimate	T - Statistik	Keputusan
1	Transparansi -> Kepuasan	0.512	4.783	Signifikan
2	Akuntabilitas -> Kepuasan	0.365	3.602	Signifikan
3	Manfaat -> Kepuasan	0.356	3.467	Signifikan
4	Transparansi -> Loyalitas	0.297	2.158	Signifikan
5	Akuntabilitas -> Loyalitas	0.336	3.099	Signifikan
6	Manfaat -> Loyalitas	0.294	2.003	Signifikan
7	Kepuasan -> Loyalitas	0.434	3.989	Signifikan

Sumber : data yang diolah

Keterangan : t Tabel (0.05, 116) = 1.671

a. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang berbunyi Transparansi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis pertama yaitu Transparansi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam

menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-statistik sebesar 4.783 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.512. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Transparansi Informasi terhadap kepuasan muzaki artinya bahwa semakin besar transparansi informasi BAZIS maka akan

semakin besar pula kepuasan pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas Transparansi Informasi ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap kepuasan pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis pertama telah terbukti, dan diterima.*

b. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang berbunyi Akuntabilitas organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis kedua yaitu Akuntabilitas organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-statistik sebesar 3.602 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.365. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Akuntabilitas organisasi terhadap kepuasan muzaki artinya bahwa semakin besar Akuntabilitas dalam organisasi BAZIS maka akan semakin besar pula kepuasan pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas Akuntabilitas ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap kepuasan pembayar zakat (muzaki)

BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis kedua telah terbukti, dan diterima.*

c. Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang berbunyi Kemanfaatan BAZIS berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis ketiga yaitu Kemanfaatan BAZIS berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-statistik sebesar 3.467 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.356. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Manfaat BAZIS terhadap kepuasan muzaki artinya bahwa semakin besar Manfaat dari suatu BAZIS maka akan semakin besar pula kepuasan pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas Kemanfaatan BAZIS terhadap kemaslahatan umum ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap kepuasan pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis ketiga telah terbukti, dan diterima.*

d. Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang berbunyi Transparansi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan

zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis keempat yaitu Transparansi informasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-statistik sebesar 2.158 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.297. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Transparansi Informasi terhadap Loyalitas muzaki artinya bahwa semakin besar transparansi informasi BAZIS maka akan semakin besar pula Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS Jawa Tengah. Dengan kata lain bila kualitas Transparansi Informasi ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis keempat telah terbukti, dan diterima.*

e. Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima yang berbunyi Akuntabilitas Organisasi BAZIS berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis kelima yaitu Akuntabilitas Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan Zakat Infak

dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 3.099 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.336. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Akuntabilitas Organisasi terhadap Loyalitas muzaki artinya bahwa semakin besar Akuntabilitas yang dilakukan dalam pengorganisasian BAZIS maka akan semakin besar pula Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas Akuntabilitas Organisasi ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis kelima telah terbukti, dan diterima.*

f. Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam yang berbunyi Manfaat BAZIS berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis keenam yaitu Manfaat dari adanya BAZIS kepada kemaslahatan umat berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 2.003 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.294. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh positif yang signifikan dari variabel Manfaat BAZIS terhadap Loyalitas muzaki artinya bahwa semakin besar Manfaat yang diberikan BAZIS maka akan semakin besar pula Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas Manfaat BAZIS ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis keenam telah terbukti, dan diterima.*

g. Hipotesis Ketujuh

Hipotesis ketujuh yang berbunyi Kepuasan Muzaki berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis ketujuh yaitu Kepuasan Muzaki berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 3.989 dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.434. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel Kepuasan Muzaki terhadap Loyalitas muzaki artinya bahwa semakin besar Muzaki puas terhadap pengelolaan BAZIS maka akan semakin besar pula Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas Kepuasan Muzaki ditingkatkan secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat

memberikan dampak yang sangat positif terhadap Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka *hipotesis ketujuh telah terbukti, dan diterima.*

4. 2 Temuan Empiris / Teoritis

Dalam penelitian ini dibangun atas dasar teori agensi (*Agency Theory*) yang mengatakan bahwa secara ideal, agen dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas, dan tanggung jawabnya dalam memaksimalkan kemakmuran. Namun kenyataannya, karena adanya informasi asimetri dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pemilik, maka agen akan menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan pemilik

Dalam perjalanan waktu, masalah keagenan semakin kompleks, dimana masalah keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dengan pemilik, tetapi juga antara pemegang saham dengan kreditur. Antara pemegang saham dengan *stakeholders* seperti : pemasok, karyawan dan *stakeholders* yang lain. Adanya konflik keagenan yang semakin kompleks ini kemudian diperlukan *good corporate governace*, agar kepentingan berbagai pihak yang terlibat dengan lembaga tidak dirugikan.

Solusi permasalahan dalam *agency theory* ini adalah penerapan *good Corporate Governance / CCG* yang dibangun dari dua pilar utama, yaitu faktor transparansi dan faktor akuntabilitas. Terdapat dua sudut pandang *corporate governance*, yaitu *corporate governance* dalam sudut pandang sempit dan

luas. *Corporate governance* berdasarkan sudut pandang sempit adalah sebagai hubungan antara perusahaan (pengelola) dengan pemegang saham (pemilik) . *Corporate governance* menurut sudut pandang luas adalah hubungan antara perusahaan (satu unit ekonomi) dengan pemegang saham, juga antara pengelola dengan *stakeholders* lain, seperti : Karyawan, pelanggan, pemasok dan sebagainya. Berdasarkan uraian ini, diketahui *corporate governance* sebagai suatu *check and balance*, baik internal maupun eksternal yang menjamin, bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* dan tanggung jawab secara sosial terhadap semua aktifitas perusahaan.

Dalam *positivist agency theory* lebih menfokuskan pada identifikasi situasi ketika agen dan principal mempunyai tujuan yang berbeda dan kemudian menjelaskan mekanisme *governance* yang dapat membatasi *self interest* dari agen. Aliran ini membahas tentang hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer. Solusi untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham adalah kepemilikan ekuitas.

Daftar Pustaka

Adiwijaya,dkk, 2003, *Aplikasi BAZIS Berbasis Produktif di Kodia Semarang*. Laporan Hasil Penelitian

Adiwijaya,dkk, 2008, *Good Governanve BAZIS di Propinsi DKI Jakarta*. Laporan Hasil Penelitian

Abu Baker dan Chaider, 2006. *Filantropi dan keadilan sosial*, Jakarta. CSRC dan FF

Afzalurrahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 3*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

Allan, 1999, "Civil Society & Public Accountability : *the Need for Active Monitoring dalam diskusi internasional 9-th International Anti-Corruption Conference*, Durban, South Africa

Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana,

Ariyoto, Archon, Fung and Erik Olin Wright, 2000, *Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, The Real Utopias Project IV, London : Verso

Asian Development Bank, (1999), *Governance : Sound Development Management*,

Assael,1984, *Customer Behavior and Marketing Action*. Second Edition. Boston, Kent Publishing Company.

- BAPPENAS, *Pembangunan Daerah Dalam Angka 2000*, Jakarta : BAPPENAS,2000
- BAZIS DKI, 2006, *Manajemen ZIS*, Jakarta, BAZIS Propinsi DKI
- Berle and Mean, Carlson, Dawn S. & Perrewe, Pamela L., 1995, Institutionalization of organizational ethics through transformational leadership, *Journal of Business Ethics*. 14 (10).
- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Farid, 2007, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, PT BEJ
- BPS, 2006, *Statistik Indonesia* , Jakarta, Badan Pusat Statistik, BPS- Statistics Indonesia
- BPS, 2007, *Statistik Indonesia* , Jakarta, Badan Pusat Statistik, BPS- Statistics Indonesia
- Ball and Brown, Warren B. & Moberg, Dennis J., 1980, *Organizational Theory and Management: A Macro Approach*, Canada, John Willey and Sons Inc
- Budiardjo Miriam, (2000), *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Cooper, D. R. dan W. C. Emory. (1995), *Business Research Methods*, Irwin Prentice Hall, US.
- Clugston, Michael. 2000. The mediating effects of multidimensional commitment on job satisfaction and intent to leave. *Journal of Organizational Behavior*. 21: 477-486.
- Departemen Agama RI,2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mekar Tri Karya
- Dwiyer, Schurr, OH, 1987, Developing Buyer-Seller Relationship, *Journal of Marketing*. 51 (April).
- Dessler, G., 1985, *Managing Organizations in An Era of Change*, The Dryden Press
- Dey and Krishnan,2002, *Forum on Ensuring Accountability and Transparency in the Public Sector*, Brasilia,
- Eisenhart,1998, *Public Participation in Development, Planning and Management : Cases from Africa and Asia*, London : Westview Press
- Eri Sudewo,2004, *Manajemen Zakat*, Ciputat, Institut Manajemen Zakat
- Evelyn, 2007, *pengaruh pengumuman laporan keuangan tahunan terhadap perubahan*

- harga saham di Bursa Efek Jakarta*, Bandung, UNPAD
- Ferdinand, Augusty. 2000. *Strategic Patways Toward Sustainable Competitive Advantage: Unplished DBA Thesis*, Soutern Cross, Lismore, Australia.
- Fletcher, Seymour, 2004, "AID University Linkages for Agriculturl Development", *Journal of Higher Education*, Vol 62, No:3, p:288-316
- FOZ, Jasmina,Thia,at.al, 2007, "Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota" , *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, VOL.XLIX No.4
- .Gibson, James L., et. all., 2000, *Organizations: Behavior, Structure, Processes*, 10th edition, New York, McGraw Hill
- Gordon, Judith R., 1999, *Organizational Behavior: A Diagnostic Approach*, 6th edition, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Hair, Jr., F. Joseph, R. E. Anderson, R. L. Tatham dan W. C. Black. (1992), *Multivariate Data Analysis with Readings*, Macmillan.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1996, *Akuntansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001, *Teori Akuntansi* , Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Harahap, Sofyan Syafri, 2003, *Bunga Rampai Akuntansi Islam*, Jakarta, Pustaka Quantum.
- Harso, 2005, *Tata Kelola Corporasi yang Baik*, Bandung, ITB
- Ikatan Akuntan indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat
- Imam Zabidi, 2002, Ringkasan Hadis shahih al Bukhari, Jakarta, Pustaka Amani
- Irdam, djamal, 2006, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta, Nuansa Madani
- Ivancevich, John M., and Matteson, M. T. 1999. *Organizational Behavior and Management*. (fifth edition). By Irwin/McGraw-Hill International Editions.
- Jensen M and W.H. Meckling (1986), "theory of the firm : Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structur" , *Journal of Financial Economics*

- Keraf, 1991, *Etika Bisnis, Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Yogjakarta, Kanisius
- Kieso, Weygandt dan Warfield, 2001, *Akuntansi Intermediate* jilid 1, Jakarta, Erlangga.
- Letza and Sun, Jay M. Shafritz, 1997, "Introducing Public Administration", USA : Longman
- Levesque and McDougall (1998), *Organizational Behavior*, 7th edition, New York, McGraw Hill
- Levy, 2001, *Forum on Ensuring Accountability and Transparency in the Public Sector*, Brasilia
- Minogue, 2003, artikel "The management of public change: from old public administration to new public management" , British Council Briefing.
- Menon A, Bharadwaj S.G, Adidam P, J, Edison S.W; 1999" Antecedents and Consequence of Marketing Strategy Making : Model and Tes ". *Journal of Marketing*. Vol 63.p.18-40.
- Meyer, J.P.,Irving,G., & Allen, N.J. 1998. Examination of combined effects of work values and early work experience on organizational commitment. *Journal of Organizational Behavior*, 19: 29-52
- Naim, Abdullah Ahmed. 2003. *Filantropi untuk keadilan sosial menurut tradisi Islam*, Jakarta, PBB dan FF
- Naser and Moutinho, 1997, *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*, 10th edition, New York, McGraw Hill Companies Inc.
- Nasution, 2007, *zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah*, Medan, Yayasan harkat Bangsa
- Peters, Ganie-Rochman, Meuthia, 2000 "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta : KOMNAS HAM.
- Sekaran, U., 2003, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, New York, John Wiley & Sons Inc.
- Shafrits and Russel, Sweeney, 1997, *The importance of organizational and national culture*, *European Business Review*, Vol. 94 No. 5, MCB University Press

Shleifer, Andrei and Robert W, Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *The Journal of Finance*, pp.737-783

Solomon, J and Solomon A , 2004, *Corporate Governance and Accountability* , England , John Willey & Son, Ltd.

Sumarto, Sudarno, et.al. “Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia, “ *Kertas Kerja Semeru*, 2004

Swasono, 2005, *Ekspose Ekonomika*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, Jokjakarta

Trevino, L. K., 1986, Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionism Model, *Academy of Management Review*, 11(3): 601-617

Triyuwono, 2004, *Akuntansi Syariah*, FE.Unibraw, Malang

Watts and Zimmerman, 1986, *Positive Accounting Theory*, New Jersey : Prentice Hall International, inc.

Welhendri, Ghani, 2006, *the Spiritual in Bussiness*, Jakarta, Pena Pundi Aksara

Wibisono, 2007, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jakarta, Dalam Indra J Piliang, Jakarta, YHB

Zadjuli, 1999, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya, F.E. Unair

Zhuang, 2000. Corporate Governance and Finance in East Asia – A Study of Indonesia, Republik of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand, Asian development Bank, Manila